

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai pelaksana kewenangan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Besar harapan kami, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja apratur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 6 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar



A.A. Ngurah Bagus Airawata, ST., SP.PSDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199703 1 005

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJiP	2
1.3	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4	Kondisi dan Tantangan Pembangunan	6
1.5	Strategi dan Kebijakan	7
1.6	Program dan Kegiatan	21
1.7	Realisasi Program dan Kegiatan.....	24
BAB II	PERJANJIAN KINERJA	25
2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	26
2.2	Perjanjian Kinerja (PK).....	36
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1	Pengukuran Kinerja Organisasi	37
3.2	Realisasi Anggaran	45
3.3	Permasalahan dan Solusi.....	48
3.4	Keterkaitan Antara Program Nasional, Provinsi dan Kota	51
BAB IV	INOVASI DPUPR YANG MASUK DALAM IGA (Inovation Government Award)	53
4.1	TAKSU BLI RAI (Tata Kualitas Sungai Untuk Bersih, Lestari, Ramah dan Indah)	53
4.2	SIJALAK (Sistem Informasi jalan Kota Denpasar).....	54
4.3	SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi Kota Denpasar).....	54
BAB V	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar...	4
Tabel 1.2	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program dan Kegiatan DPUPR Tahun 2022.....	14
Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022.....	26
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja T.A. 2022.....	37
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja T.A. 2021	38
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPUPR T.A. 2022.....	41
Tabel 3.4	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib DPUPR T.A. 2022.....	45
Tabel 3.5	Program Nasional yang Menunjang SPM.....	51
Tabel 3.6	Program DPUPR yang Mendapatkan DAK.....	52

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Bidang Fisik dalam rangka mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar ke PUPR-an memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mendukung pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor di era persaingan Global ini. Denpasar sebagai Kota Besar, pusat berbagai aktivitas Perkantoran, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa lainnya sebagai salah satu destinasi wisata, akan mengalami dampak permasalahan serta perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Hal ini akan menentukan kebijakan program kegiatan bidang ke PUPR an pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dituntut pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik agar diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pembangunan secara merata seimbang, berdaya saing dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan unit dinas teknis yang melaksanakan urusan kewenangan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dalam kewenangannya melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas- tugas ke PUPR-an tersebut tentu diperlukan suatu pengelolaan unit organisasi yang mempunyai kompetensi, responsive dan dinamis terhadap perkembangan informasi dan tehnologi serta tuntutan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pembangunan di bidang Infrastruktur seperti Sanitasi, Jalan, Drainase dan Irigasi dengan kualitas yang masih perlu ditingkatkan, sehingga kualitas yang dihasilkan memiliki umur ekonomis yang lebih lama, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna serta dapat memberikan manfaat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Guna mengendalikan pemanfaatan ruang, maka DPUPR melalui Bidang Tata Ruang bertugas untuk menjaga kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif, terkendali dan berkelanjutan sehingga tercipta keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan, terkendalnya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota baik oleh pemerintah maupun masyarakat/sektor swasta. Agar dapat tercapainya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Kota diperlukan komitmen kuat dari ASN dan seluruh stake holder, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan ruang sesuai RTRW dan RDTR Kota.

Adapun arah kebijakan Walikota Denpasar adalah Mewujudkan Denpasar Sebagai Kota Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, sehingga program Pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana ke PUPR – an dilandasi pada aspek budaya dan kearifan lokal (*Local Genius*) dalam rangka mendukung terciptanya konsep pembangunan perkotaan berwawasan budaya.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan LKjIP ini mengacu Peraturan Men-Pan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

Sebagai dasar penyusunan LKjIP yang merupakan dokumen yang menggambarkan keberhasilan OPD mencapai indikator kinerja outcome / dampak atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD adalah RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). RKT dan PK merupakan acuan yang digunakan untuk pertanggungjawaban janji pencapaian tingkat kinerja outcome yang harus dicapai OPD.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Penyusunan LKjIP oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dimaksudkan sebagai bentuk laporan capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan serta sebagai alat kendali perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang lebih berdaya guna, berhasil guna, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagai media pengkomunikasian pencapaian tujuan dan sasaran OPD, serta pertanggung jawaban dan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik/stakeholder. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja OPD sebagai salah satu persyaratan dalam upaya tercapainya pemerintahan yang baik/*good governance*.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/ Fasilitas Wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yaitu pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur ke PU-an.

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas urusan wajib pelayanan dasar, dengan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang telah dirubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang.
 - b. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah pada urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan.
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebanyak 126 orang dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

NO	PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN		JABATAN	JUMLAH (Orang)
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	L	P		
1	1	-	-	-	-	-	1		Kepala Dinas PUPR	1
2	-	1	-	-	-	-	1		Sekrearis	1
3	4	2	-	-	-	-	3	3	Ka.Bid	6
4	4	9	-	-	-	-	4	9	Fungsional	13
5	-	2	-	-	-	-	1	1	Ka.Su.Bag	2
6	1	27	1	47	21	6	81	22	Staf	103
Jumlah	10	41	1	47	21	6	91	35		126

Adapun rincian Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
5. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda
6. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
7. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
8. Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda

1.4 Kondisi dan Tantangan Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar melaksanakan tugas-tugas strategis mengingat tugas pokok adalah melaksanakan program dan kegiatan infrastruktur/Fasilitas Wilayah yang merupakan pendukung sekaligus pendorong peningkatan daya saing daerah, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Propinsi Bali yang telah bertumbuh menjadi kota besar dengan beragam aktivitas yang membutuhkan kecepatan mobilitas dan penyediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Disisi lain Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian dan jasa lainnya dan terletak pada lintasan pergerakan penduduk antar kabupaten yaitu di sebelah selatan, utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Badung yaitu Kecamatan Kuta dan Selat Badung, Kecamatan Mengwi dan Abianseml serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar.

Sebagaimana kondisi yang disampaikan diatas dan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kota Denpasar, mendukung kebijakan dan pelaksanaan. Program dan kegiatan pembangunan, serta mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja di bidang infrastruktur khususnya Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan perencanaan yang terukur, comprehensive, akuntabel dan transparan, serta meningkatkan daya saing pekerja dan badan usaha jasa konstruksi.

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur ke PU-an di Kota Denpasar sudah cukup memadai dan berkualitas baik, namun demikian masih dibutuhkan pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan dimana Pemerintah Kota Denpasar berperan dalam upaya mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing yaitu melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kota Denpasar, penerbitan Rekomendasi Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar, serta tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah ada pada lingkungan internal (weakneses) dan external (threat). Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan, terbatasnya anggaran, kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kurangnya ketersediaan data base infrastruktur, kemampuan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja OPD merupakan tantangan permasalahan internal yang harus disikapi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur.

Kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peraturan pemerintah yang sering berubah dan tumpang tindih antar peraturan/perundangan merupakan tantangan permasalahan eksternal yang harus disikapi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan internal, instansi terkait dan para stakeholder, mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas SDM aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan efisiensi waktu, dan biaya serta meningkatkan kwalitas, kwantitas dan efektifitas sarana dan prasarana kerja.

1.5 Strategi dan Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, maka ditetapkan visi Kota Denpasar yaitu ” **Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**”. Guna mewujudkan visi dimaksud maka ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibnas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Denpasar tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar pada Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam kolom Indikator Sasaran, yaitu:

1. Persentase jalan dalam kondisi baik.
2. Presentase irigasi kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal.
3. Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Persentase penduduk berakses air minum yang aman.
5. Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman.
6. Persentase luas daerah tergenang.
7. Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal.
8. Persentase ketaatan RTRW.
9. Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST kondisi baik.
10. Rasio bangunan ber-IMB/PBG.
11. Jumlah TK konstruksi yang tersertifikasi kompetensi.
12. Persentase BU/Penyedia jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi.
13. Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik.
14. Indeks Kepuasan Layanan DPUPR.

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kota Denpasar yang telah ditetapkan, maka misi sebagaimana dimaksud di atas dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) tujuan jangka menengah dan 11 (sebelas) Sasaran Jangka Menengah PD.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah :

1. Meningkatnya daerah bebas banjir/genangan.
2. Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan.
3. Meningkatnya keandalan pengelolaan sumber daya air.
4. Meningkatkan akses air minum yang aman dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak.
5. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sampah.
6. Meningkatkan kinerja pengelolaan reklame Kota Denpasar.
7. Meningkatnya ketertiban bangunan gedung.
8. Meningkatkan kinerja layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
9. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.
10. Mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Untuk tercapainya tujuan jangka menengah, maka ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana dibawah ini :

1. Berkurangnya luas daerah genangan.
2. Meningkatkan kualitas layanan jalan Kota Denpasar.
3. Meningkatkan ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan penduduk berakses air minum.
5. Meningkatkan rumah tinggal bersanitasi layak.
6. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur persampahan.
7. Meningkatkan pendaapatan pajak reklame.
8. Meningkatkan bangunan gedung memenuhi standar teknis.
9. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik.
10. Meningkatkan pengembangan jasa konstruksi.
11. Peningkatan kualitas penataan ruang

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, produktif dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka ditetapkan 33 (tiga puluh tiga) Strategi dan 52 (lima puluh dua) Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

Strategi yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah :

1. Pengendalian banjir berkelanjutan dan pengurangan luasan area genangan.
2. Meningkatkan pembangunan dan pola rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan saluran drainase.
3. Penyediaan data base sistem informasi drainase berbasis data spasial yang terupdate secara berkala.
4. Percepatan pemerataan ketersediaan jalan.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.
6. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas guna menjaga kualitas jalan, keamanan dan serta estetika wajah kota.
7. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Desa.
8. Peningkatan penataan jaringan drainase jalan.

9. Peningkatan jalan yang dilengkapi trotoar.
10. Peningkatan kinerja layanan saluran irigasi dalam upaya mendukung kecukupan ketersediaan air bagi petani pada setiap musim tanam.
11. Penyediaan data base saluran irigasi berbasis soasial dan terupdate secara berkala.
12. Peningkatan upaya-upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah.
13. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas air minum (K4).
14. Peningkatan cakupan layanan sanitasi skala kota dan skala rumah tangga berbasis data special.
15. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pengelola sanitasi.
16. Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan.
17. Peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah.
18. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah.
19. Peningkatan layan pemberian ijin reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan menjaga kualitas wajah kota.
20. Peningkatan kinerja layanan penerbitan rekomendasi IMB/PBG.
21. Peningkatan kinerja layanan penertiban SLF.
22. Meningkatkan kualitas layanan DPUPR.
23. Akselerasi pencapaian 8 Area RB dan LkjIP.
24. Pengembangan dan Penguatan TIK.
25. Meningkatkan sinegritas perencanaan.
26. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi di Kota Denpasar yang bersertifikat kompetensi jasa konstruksi.
27. Peningkatan jumlah BU Jakon yang tertib Jakon.
28. Penguatan fungsi pengaturan penataan ruang.
29. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.
30. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha.
31. Penguatan basis data spatial.
32. Monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
33. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sedangkan Arah Kebijakannya adalah:

1. Peningkatan pembangunan saluran drainase.
2. Peningkatan pemeliharaan, dan rehabilitasi saluran drainase /got/ sungai
3. Pembangunan saluran drainase terpadu dengan pendanaan dari sumber anggaran non APBD.
4. Peningkatan upaya-upaya pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah pada saluran drainase dan sungai.
5. Peningkatan kebersihan sungai melalui penataan sungai untuk menjaga fungsi sungai, mencegah sungai sebagai tempat pembuangan sampah/limbah, optimalisasi penyediaan ruang terbuka yang ramah dan aman, dan mempercantik wajah kota.
6. Peningkatan gerakan kebersihan saluran drainase/got /sungai melalui sinergi antara Desa, Kelurahan, NGO dan seluruh lapisan masyarakat.
7. Pengembangan sistem informasi drainase.
8. Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar.
9. Peningkatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk menjaga dan meningkatkan, umur struktur jalan, dan fungsi drainase jalan.
10. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan secara swadaya.
11. Pembiayaan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas terpadu melalui pembiayaan alternative/kerjasama dengan pihak ke tiga.
12. Percepatan penetapan pembagian status kewenangan pengelolaan jalan Kota Denpasar.
13. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan drainase.
14. Perencanaan pembangunan drainase jalan berbasis data spasial.
15. Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan trotoar melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar.
16. Peningkatan sinergitas pengelolaan saluran irigasi dengan lembaga Subak.
17. Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
18. Pengembangan sistem informasi sumber daya air berbasis special.
19. Peningkatan jumlah pembuatan sumur-sumur resapan dan berkoordinasi dengan *stake holder* untuk pencegahan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut.
20. Pengembangan teknologi/inovasi dalam upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah.
21. Meningkatkan cakupan penyediaan sambungan perpipaan rumah tangga.

22. Mendorong peningkatan peran pelaku usaha melalui program CSR dalam penyediaan akses air minum masyarakat.
23. Meningkatkan upaya pendanaan penyediaan akses air minum melalui sumber dana non APBD Kota Denpasar.
24. Peningkatan cakupan layanan sanitasi melalui penyediaan sambungan Rumah DSDP.
25. Fasilitasi peningkatan penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat.
26. Pengembangan alternative teknologi pengolahan air limbah, yang adaptif terhadap ketersediaan sumber daya perkotaan.
27. Peningkatan pembangunan infrastruktur sanitasi melalui kolaborasi multi *stakeholder*
28. Peningkatan kualitas infrastruktur TPS 3R.
29. Mendorong pengembangan alternative teknologi pengelolaan persampahan melalui kerjasama dengan Universitas, NGO/LSM dan lembaga pemerintah.
30. Peningkatan kinerja layanan ijin reklame, berbasis spacial.
31. Peningkatan layanan penilaian kesesuaian standar teknis pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah.
32. Peningkatan layanan penilaian kelayakan pembangunan bangunan gedung pemerintah maupun non pemerintah.
33. Peningkatan kapasitas SDM.
34. Meningkatkan kualitas layanan DPUPR.
35. Meningkatkan nilai RB.
36. Meningkatkan nilai LkjIP
37. Penguatan kualitas dan kapasitas TIK DPUPR.
38. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan indikator capaian.
39. Peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsive gender, handal dan ramah bagi semua.
40. Peningkatan peserta sertifikasi keterampilan jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan.
41. Peningkatan kerjasama dengan pihak ke 3/ masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja konstruksi.
42. Peningkatan kapasitas dan intensitas monitoring tertib jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi.
43. Peningkatan sosialisasi tertib jasa konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi.
44. Penguatan pelaksanaan PUG di bidang jasa konstruksi.
45. Percepatan penyelesaian RTRW berikut turunnannya.
46. Penyebarluasan informasi regulasi penataan ruang.
47. Meningkatkan kinerja layanan penataan ruang melalui RTDY OSS.
48. Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan (RTH Publik 20 % dan RTH Privat 10 %).

49. Peningkatan keterpaduan pembangunan berbasis data spesial.
50. Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang.
51. Meningkatkan pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
52. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi jasa konstruksi.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) indikator yang meliputi:

1. Persentase jalan dalam kondisi baik.
2. Presentase irigasi kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal.
3. Persentase penduduk berakses air minum yang aman.
4. Persentase rumah tinggal bersanitasi air limbah aman.
5. Persentase TPA/TPS/TPS 3R/TPST kondisi baik.
6. Persentase luas daerah tergenang.
7. Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal.
8. Rasio bangunan ber-IMB/PBG.
9. Persentase ketaatan terhadap RTRW.
10. Persentase usaha jasa konstruksi yang tertib penerapan K3.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mengacu pada Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Denpasar. Keterkaitan Program dan Kegiatan sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Program Dan Kegiatan DPUPR Tahun 2022

RPJMD 2021 - 2026						RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2021 – 2026			KETERKAITAN						
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	KEGIATAN 2022	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	1 Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan 2 Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air 3 Meningkatkan akses air minum yang aman dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak. 4 Meningkatkan daerah bebas banjir/genangan	1. Meningkatkan kualitas layanan jalan Kota Denpasar 2. Meningkatkan ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 3. Meningkatkan akses air minum aman 4. Meningkatkan Rumah Tinggal Bersanitasi layak 5. Berkurangnya luas daerah genangan 6. Peningkatan kualitas layanan Penataan Ruang 7. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur persampahan 8. Meningkatkan Bangunan	1. Persentase jalan dalam kondisi baik 2. Persentase jalan lingkungandalam kondisi baik 3. Presentase jalan yang memiliki drainase dan terkoneksi 4. Persentase jalan yang bertrotoar 5. Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal. 6. Meningkatnya tinggi muka Air Tanah 7. Persentasi penduduk berakses air minum 8. Persentase rumah tinggal bersanitasi 9. Persentase luas daerah tergenang 10. Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal 11. Persentase Ketaatan RTRW 12. Persentase	1. Pengendalian banjir berkelanjutan dan pengurangan luasan area genangan 2. Meningkatkan pembangunan dan pola rehabilitasi.p emeliharaan dan pengawasan saluran drainase. 3. Penyediaan data base sistem informasi drainase berbasis data spasial yang terupdate secara berkala 4. Percepatan pemerataan ketersediaan jalan	1. Peningkatan pembangunan saluran drainase. 2. Peningkatan pemeliharaan, dan rehabilitasi saluran drainase /got/ sungai 3. Pembangunan saluran drainase terpadu dengan pendanaan dari sumber anggaran non APBD. 4. Peningkatan upaya-upaya pengurangan timbulan sampah dan pengelolaan sampah pada saluran drainase dan sungai. 5. Peningkatan kebersihan sungai melalui penataan sungai untuk menjaga fungsi sungai, mencegah sungai sebagai tempat pembuangan sampah/limbah, optimalisasi penyediaan ruang terbuka yang ramah dan aman, dan mempercantik wajah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/ Kota	1. Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	9	11	20	23, 24, 25	35,36,37, 38	
									2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	9	11	20	22	34, 39
									3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	9	11	20	22	34, 39
									4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	9	11	20	22	34, 39
									5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	9	11	20	22	34, 39
									6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	9	11	20	22	34, 39

4. Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Unggul dalam Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karena Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	8. Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi 9. Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Denpasar 10. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Reklame Kota Denpasar	Gedung memenuhi Standar Teknis 9. Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi 10. Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame 11. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan yang Baik	Kesesuaian Pola Ruang 13. Persentase Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 14. Rasio Bangunan ber-IMB/PBG 15. Rasio Bangunan ber-SLF 16. Persentase pendapatan pajak Reklame 17. Jumlah TK Konstruksi yg bersertifikasi kompetensi 18. Persentase BU/Penyedia Jasa Konstruksi yg Tertib jasa konstruksi 19. Indeks Kepuasan Layanan DPUPR 20. Nilai Kinerja Perangkat Daerah 21. Dokumen Perencanaan DPUPR 22. Persentase TPS/TPS3R Kondisi baik	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan 6. Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas guna menjaga kualitas jalan, keamanan dan serta estetika wajah kota 7. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Desa. 8. Peningkatan Penataan Jaringan Drainase jalan 9. Peningkatan jalan yang dilengkapi trotoar	6. Peningkatan Gerakan Kebersihan saluran drainase/got /sungai melalui sinergi antara Desa, Kelurahan, NGO dan seluruh lapisan masyarakat. 7. Pengembangan sistem informasi drainase 8. Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar. 9. Peningkatan Pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk menjaga dan meningkatkan umur struktur jalan, dan fungsi drainase jalan 10. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan secara swadaya. 11. Pembiayaan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan/ruang manfaat jalan untuk utilitas terpadu melalui pembiayaan alternative/kerjasama dengan pihak ke tiga	2. Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase Jalan Kondisi Mantap	1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3	1	1	1	4, 6, 7, 8, 9, 10	9
						3. Program Pengembangan Permukiman	1. Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman	1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3	3	1	2	4	5
						4. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA)	1. Persentase Panjang Sungai Berfungsi Normal 2. Persentase Panjang Jaringan Irigasi Berfungsi Normal	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3	2	2	5	10	16, 17
						5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	3	3	3	7	13	21, 22, 23
						6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan sistem air limbah	1. Persentase rumah tangga terakses instalasi pengolahan air limbah	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	3	4	8	14	24
						7. Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional	1. Persentase sarana persampahan yang memadai	1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota	4	6	7	22	17, 18	4, 5, 28

				10. Peningkatan kinerja layanan saluran irigasi dalam upaya mendukung kecukupan ketersediaan air bagi petani pada setiap musim tanam.	12.Percepatan penetapan pembagian status kewenangan pengelolaan jalan Kota Denpasar.	8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	4	5	9, 10	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16
				11. Penyediaan data base saluran irigasi berbasis soasial dan terupdate secara berkala.	13.Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan dan drainase.	9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase Ketaatan terhadap RTRW	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	5	5	6	11, 12	28, 29, 30, 31, 32	46, 47, 48, 49, 50
			12. Peningkatan upaya-upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah	14.Perencanaan Pembangunan drainase jalan berbasis data spasial.	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			5	5	6	11, 12	33	51, 52	
			13. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas air minum (K4).	15.Meningkatkan upaya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan trotoar melalui sumber pendanaan di luar APBD Kota Denpasar	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota			5	5	6	11, 12	33	51, 52	
				14. Peningkatan cakupan	16.Peningkatan sinergitas pengelolaan saluran irigasi dengan lembaga Subak	10. Program Penataan Bangunan Gedung	1. Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3	7, 10	8	14, 15, 16	20, 21, 19	30, 31, 32, 33
					17.Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi									
					18.Pengembangan sistem informasi sumber daya air berbasis spaial.									
					19.Peningkatan jumlah pembuatan sumur-sumur resapan dan berkoordinasi dengan stake holder untuk pencegahan penurunan muka air									

				<p>layanan sanitasi sekala kota dan skala rumah tangga berbasis data special</p> <p>15. Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pengelola sanitasi</p> <p>16. Pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan</p> <p>17. Peningkatan kapasitas layanan pengelolaan sampah</p> <p>18. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah</p> <p>19. Peningkatan layanan pemberian ijin reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan menjaga kualitas</p>	<p>tanah dan intrusi air laut.</p> <p>20. Pengembangan teknologi/inovasi dalam upaya pengendalian kualitas dan kuantitas air tanah</p> <p>21. Meningkatkan cakupan penyediaan sambungan perpipaan Rumah Tangga.</p> <p>22. Mendorong peningkatan peran pelaku usaha melalui program CSR dalam penyediaan akses air minum masyarakat.</p> <p>23. Meningkatkan upaya pendanaan penyediaan akses air minum melalui sumber dana non APBD Kota Denpasar.</p> <p>25. Peningkatan cakupan layanan sanitasi melalui penyediaan sambungan Rumah DSDP.</p> <p>26. Fasilitasi peningkatan penyediaan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat.</p> <p>27. Pengembangan alternative teknologi pengolahan air limbah, yang adaptif terhadap ketersediaan sumber daya perkotaan</p> <p>28. Peningkatan</p>	<p>11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</p> <p>12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p>	<p>1. Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang memenuhi standar teknis</p> <p>1. Persentase usaha Jasa Konstruksi yang tertib Jasa Konstruksi</p>	<p>2. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</p>	<p>3</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>7, 10</p> <p>8</p> <p>8</p>	<p>8</p> <p>9</p> <p>9</p>	<p>14, 15, 16</p> <p>17</p> <p>17, 18</p>	<p>19, 20, 21</p> <p>26</p> <p>26, 27</p>	<p>30, 31, 32, 33</p> <p>40</p> <p>40, 41, 42, 43, 45</p>
--	--	--	--	---	--	--	---	--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	---	---	---

				<p>iklim investasi dan kemudahan berusaha</p> <p>30. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha</p> <p>31. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha</p> <p>32. Penguatan basis data spatial</p> <p>33. Monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang</p>	<p>perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsive gender, handal dan ramah bagi semua</p> <p>41. Peningkatan peserta sertifikasi keterampilan jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan.</p> <p>42. Peningkatan kerjasama dengan pihak ke 3/ masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga kerja konstruksi.</p> <p>43. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi jasa konstruksi</p> <p>44. Peningkatan kapasitas dan intensitas monitoring tertib pelaksanaan dan tertib usaha jasa konstruksi.</p> <p>45. Peningkatan sosialisasi tertib jasa konstruksi kepada masyarakat Jasa Konstruksi</p> <p>46. Penguatan pelaksanaan PUG di bidang jasa konstruksi.</p> <p>47. Percepatan penyelesaian RTRW berikut turunannya</p> <p>48. Penyebarluasan informasi regulasi penataan ruang</p> <p>49. Meningkatkan kinerja layanan penataan</p>										
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>ruang melalui RTDY OSS</p> <p>50.Pemenuhan RTH Kawasan Perkotaan (RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%)</p> <p>51.Peningkatan keterpaduan pembangunan berbasis data spesial</p> <p>52.Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang</p> <p>53.Meningkatkan pengawasan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.6 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pelayanan Dasar, DPUPR Kota Denpasar melaksanakan **12 Program, 20 Kegiatan** dan **40 Sub Kegiatan** yang pelaksanaannya dibagi pada 6 bidang dan 1 sekretariat. Program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 2 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari 4 Program, 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari 2 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, Bidang Penataan Ruang terdiri dari 1 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program terdiri dari 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, Sekretariat terdiri dari 1 Program, 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Langsung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.3. Administasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.5 Penyediaan Bahan/Material
 - 1.3.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Alat Besar
 - 1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 4.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 5.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 6.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - 6.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- 7. Program Pengembangan Permukiman
 - 7.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 8.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 8.1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

- 8.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 8.1.3 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
- 9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - 9.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 9.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 10. Program Penyelenggaraan Jalan
 - 10.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
 - 10.1.1 Survey Kondisi Jalan / Jembatan
 - 10.1.2 Rekonstruksi Jalan
 - 10.1.3 Rehabilitasi Jalan
 - 10.1.4 Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 10.1.5 Pembangunan Jembatan
 - 10.1.6 Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 11.1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 11.1.1 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - 11.2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - 11.2.1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 12.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 12.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - 12.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 12.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - 12.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 12.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - 12.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1.7 Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Denpasar direalisasikan melalui **12 Program, 20 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan**, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 182.704.719.039,00** dengan rincian sebagai berikut:

- ANGGARAN PADA DPUPR KOTA DENPASAR T. A. 2022
 - a. BELANJA OPERASI : Rp 63.613.764.974,00
 - b. BELANJA MODAL : Rp 119.090.954.065,00
 - TOTAL : Rp. 182.704.719.039,00**

- TOTAL RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (BELANJA) DPUPR KOTA DENPASAR T. A. 2022

	RENCANA	REALISASI
FISIK	100 %	100 %
KEUANGAN	Rp. 182.704.719.039,00 (100 %)	Rp. 141.039.448.895,00 (77,20 %)

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Strategis sebagaimana disampaikan pada Bab I diatas, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menyajikan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output) dan outcome dari sasaran strategis dan strategi pencapaiannya. RKT merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja dalam satu tahun anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang menjadi IKU PD dengan 12 Program, 20 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. RKT disusun mengacu pada program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Gaji Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Tahun	1 Tahun
					2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Analisa Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun 2023	Paket	1 Paket
					3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Tahun	1 Tahun
						2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Peralatan rumah tangga yang tersedia	Tahun	1 Tahun
						3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tahun	1 Tahun
						4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Bahan bacaan dan buku peraturan perundangan yang tersedia	Tahun	1 Tahun
						5 Penyediaan Bahan/Material	- Bahan/Material yang tersedia	Tahun	1 Tahun
						6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Konsumsi yang tersedia	Tahun	1 Tahun

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target		
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang tersedia	Unit	1 Unit
							2	Pengadaan Alat Berat	- Alat Besar yang diadakan	Unit	2 Unit
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	Tahun	1 Tahun
							2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Tahun	1 Tahun
					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	Tahun	1 Tahun
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Peralatan dan perlengkapan kantor dengan kondisi baik	Tahun	1 Tahun

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
						3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam kondisi baik	Tahun	1 Tahun
						4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam kondisi baik	Tahun	1 Tahun
1	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar								
		Persentase tingkat kondisi jalan di Kota Denpasar baik dan sedang	78,13 % Jalan Kota dalam Kondisi Baik dan Sedang	- Penyelenggaraan Jalan	1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	- Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Laporan	2 Laporan
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	100% terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota			2 Rekonstruksi Jalan	- Rekonstruksi Jalan	M	0,305 M
						3 Pemeliharaan Rutin Jalan	- Pemeliharaan Jalan dan Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat	M	22,00 Km dan 10.000 M2
						4 Rehabilitasi Jalan	- Rehabilitasi Jalan	M	

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
						5 Pembangunan Jembatan	- Pembangunan Jembatan	Buah	1 Buah
						6 Pemeliharaan Rutin Jembatan	- Pemeliharaan Jembatan	Buah	10 Buah
2	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat								
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	100%	- Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	8 Jaringan Irigasi	Unit	1 Unit
		Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%						
3	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan								

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
		Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	67,00%	- Pengelolaam dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	- Pembuatan sambungan Pipa Tersier untuk Sambungan rumah Air Minum	Laporan Pengawas, Laporan DED, Paket	2 Laporan Pengawasan 2 laporan DED 2 paket 2 Laporan DED
4	Meningkatnya kualitas Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan								
		Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	63%	- Pengelolaam dam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terpasangnya Sambungan Rumah Air Limbah	Paket dan Laporan	1 Laporan Pengawasan 1 Laporan DED 1 Paket
		Jumlah sambungan rumah skala kota	350 SR						

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
				- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Paket	9 Paket
5	Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan								
		Persentase pengurangan genangan	82,39%	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Saluran drainase	M	560 M
						2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	- Saluran Drainase	M	1.500 M
6	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung dan prasarana Bangunan Gedung Pemerintah								

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
		Persentase terbangunnya Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan teknis	10%	- Pengembangan Permukiman	1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Panjang Jalan lingkungan yang ditingkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman yang tersedia berbasis masyarakat	M'	4.200,80 M'
		Terlayannya masyarakat untuk memperoleh rekomendasi teknis Bangunan Gedung paling lama 8 hari setelah persyaratan lengkap	100%			2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Panjang jalan lingkungan yang dipelihara	M'	1000 M'
				- Penataan Bangunan Gedung	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	- Rekomendasi teknis dan Arsip imb dalam bentuk elektronik - Terbangunnya bangunsn gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	% %	0.36% 0.36%

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
							- Terbangunnya bangunsn gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan teknis gedung	%	1.8%
						2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	- Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar	Unit	1 Unit
						3 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	- Tersusunnya regulasi terkait bangunan gedung sesuai NSPM	%	20%
				- Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Infrastruktur Gedung Kantor, Gedung Kesehatan dan Pasar di Kota Denpasar	Unit	3 Unit
7	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar								

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
		Tersedianya peraturan tentang Rencana Tata Ruang	1 Dokumen (100%)	- Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	- Jumlah Perwali RRTR	Dokumen	5 Dokumen
		Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan informasi pemanfaatan ruang paling lama 14 hari setelah persyaratan lengkap	100%		2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	- Jumlah penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang/KKPR tepat waktu	% dan Laporan	100% dan 1 Laporan
		Menurunnya pelanggaran tata ruang	700 (Objek pengawasan bangunan tower dan reklamae)						
					3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	- Jumlah pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan	240 kali pengawasan
						2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	- Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan	1 Laporan

No	SASARAN/ CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN				
	Uraian	Indikator	Target Capaian		Uraian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target
8	Meningkatnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Kontruksi								
		Persentase tersedianya layanan rekomendasi ijin usaha jasa konstruksi paling lama 2 hari kerja setelah lengkap	100%	- Pengembangan Jasa Konstruksi	1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	- Ketersediaan Data dan Informasi data base jasa Konstruksi, Revisi Perda dan Perwali IUJK , Sosialisasi Jasa Konstruksi	%	100%
					2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	- Jumlah Monitoring Tertib Jasa Konstruksi	Badan Usaha dan %	47 Badan Usaha (17,80 %)

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara Walikota Denpasar dengan Kepala OPD/Pengguna Anggaran untuk mewujudkan target kinerja tertentu (*out put* dan *out come*) berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja yang disepakati untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam PK terlampir. PK disusun mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan dengan upaya pencapaian melalui penetapan program dan kegiatan yang dilangsungkan setiap tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang T.A 2022 telah dapat dilaksanakan dan capaian target dari indikator kinerja tersebut dan mengalami peningkatan dari target T.A 2021 sebagaimana tersaji pada tabel. 3.1 mengenai Pengukuran Kinerja T.A. 2022 dan tabel 3.2 mengenai Pengukuran Kinerja T.A. 2021 dibawah ini.

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja T.A 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
						Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar	- Persentase jalan dalam kondisi baik	61,74 %	Panjang jalan dalam kondisi baik = $\frac{351.260}{486.084} \times 100\%$	72,26%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.
2	Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	- Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal.	69,68 %	Ketersediaan air irigasi (liter/detik) pada setiap musim hujan = $\frac{366}{366} \times 100\%$	100%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.
3	Meningkatkan penduduk berakses air minum.	- Persentase penduduk berakses air minum yang aman.	53,06 %	Masyarakat terlayani air minum = $\frac{77.824 \text{ SR}}{146.512 \text{ KK}} \times 100\%$	53,12%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.
4	Meningkatnya Rumah Tinggal Bersantiasi Layak.	- Persentase rumah tinggal bersantiasi Air limbah yang aman	6,93 %	Rumah tinggal bersantiasi = $\frac{13.478 \text{ SR}}{146.512 \text{ KK}} \times 100\%$	9,20%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.
5	Berkurangnya luas daerah genangan	- Persentase luas daerah tergenang	17,61 %	Luasan daerah tergenang = $\frac{19.939}{22.7052} \times 100\%$	87,82%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.
		- Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	70,00 %	Drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal = $\frac{1.628.732}{1.630.880} \times 100\%$	99,86%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.
6	Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	- Rasio Bangunan ber-IMB/PBG	0,36 %	Rasio bangunan gedung = $\frac{758 \text{ capaian}}{1080 \text{ target}} \times 100\%$ = 70.18%	0.25%		Belum tercapai karena berkas dari permohonan IMB tidak memenuhi standar teknis dan administrasi, sehingga beberapa permohonan ditolak.
7	Peningkatan kualitas Penataan Ruang	- Persentase ketaatan terhadap RTRW	95,00 %	Persentase ketaatan RTRW = $\frac{\text{Luas Pelanggaran}}{\text{Luas Rencana Pola Ruang}} \times 100\%$	94,86%		Anggaran untuk pekerjaan neraca pemanfaatan lahan tidak diakomodir pada tahun 2022. Angka tersebut adalah nilai ketaatan tahun 2021.
8	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	- Persentase aksesibilitas di lingkungan permukiman kondisi baik	100,00 %	Persentase aksesibilitas berupa jalan lingkungan di permukiman dalam kondisi baik = $\frac{703.028,32 \text{ KM}}{879.850,32 \text{ KM}} \times 100\%$	79,90%		<ul style="list-style-type: none"> • Dana APBD yang terbatas dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan • Tumpang tindih kewenangan dengan Desa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
						Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur persampahan	- Persentase TPA / TPS / TPS / 3 R / TPST kondisi baik	82,00 %	Persentase TPS 3R kondisi baik untuk melayani masyarakat = $\frac{22 \text{ unit}}{129 \text{ unit}} \times 100\%$	17,05 %		Belum tercapainya target pembangunan TPS 3R karena kesulitan lahan untuk pembangunan, dukungan masyarakat dan penolakan dari masyarakat penyandang.
10	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	- Persentase usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi	5 %	Persentase BU / Penyedia Jasa Konstruksi = $\frac{47}{57} \times 100\%$	82,46%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target.

Tabel. 3.2
Pengukuran Kinerja T.A 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
						Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar	- Persentase jalan dalam kondisi baik	68,89%	Panjang jalan dalam kondisi baik = $\frac{298.055}{486.084} \times 100\%$	61,32%		Belum tercapai karena Refocusing anggaran
2	Meningkatnya ketersediaan air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	- Presentase Irigasi Kota dalam kondisi baik dan berfungsi normal.	100 %	Ketersediaan air irigasi (liter/detik) pada setiap musim hujan = $\frac{366}{366} \times 100\%$	100 %	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil akhir sesuai target
3	Meningkatkan penduduk berakses air minum.	- Persentase penduduk berakses air minum.	52%	Masyarakat terlayani air minum = $\frac{388.690}{725.310} \times 100\% = 52,90\%$	52,90%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil melebihi target
4	Meningkatnya Rumah Tinggal Bersanitasi Layak.	- Persentase rumah tinggal bersanitasi Kawasan layanan air limbah domestik	8%	Rumah tinggal bersanitasi = $\frac{62.475}{725.310} \times 100\% = 8,61\%$	8,61%	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil melebihi target
5	Berkurangnya luas daerah genangan	- Persentase luas daerah tergenang	100 %	Luasan daerah tergenang = $\frac{18.7074}{22.7052} \times 100\%$	82,39%		Belum tercapai karena masih ada titik genangan yang belum tertangani sebesar 3.9984 Ha (17,16%)
		- Persentase drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal	100%	Drainase dalam kondisi baik dan berfungsi normal = $\frac{1.627.864}{1.630.880} \times 100\%$	99,85%		Belum Tercapai karena adanya sedimentasi dan kerusakan akibat umur konstruksi
6	Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	- Rasio Bangunan ber-IMB/PBG	100%	Rasio bangunan gedung = $\frac{1252}{2952} \times 100\% = 42,4\%$	42,4%		Belum mencapai karena berkas dari permohonan IMB tidak memenuhi standar teknis dan administrasi, jadi beberapa permohonan ditolak
7	Pemanfaatan ruang yang produktif dan sesuai peruntukan	- Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luasan wilayah Kota/Kawasan perkotaan	20%	Luasan RTH Publik = $\frac{1.792.12}{2.519} \times 20\%$	14,23%		Belum tercapai pemenuhan target 20% dicapai dalam kurun waktu 20 tahun perencanaan RTRW. Target 5 tahunan tercantum dalam indikasi program utama RTRW
8	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	- Persentase BU / Penyedia Jasa Konstruksi yg Tertib jasa konstruksi	264 Badan Usaha	Persentase BU / Penyedia Jasa Konstruksi = $\frac{245}{67} \times 100\% = 365,67\%$	365,67 %	√	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan sehingga hasil melebihi target

Penanganan daerah rawan genangan/banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah genangan yang cukup tinggi dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dampak bagi kelancaran transportasi, kesehatan lingkungan dan fasilitas permukiman masyarakat. Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya daerah pemukiman masyarakat dan adanya pengalihan fungsi lahan (terlampir peta daerah rawan genangan/banjir). Namun demikian DPUPR Kota Denpasar mengupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah meningkatnya daerah rawan genangan/banjir guna mencegah sebaran dampak genangan/banjir.

Kualitas jalan yang baik dan mantap di Kota Denpasar sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar maupun masyarakat komuter yang menuju/melintasi Kota Denpasar sangat tinggi sehingga akan meningkatkan resiko keselamatan pengguna jalan apabila kondisi/kualitas jalan yang tidak baik dan tidak mantap. Masalah kemandapan jalan menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar dengan menetakannya sebagai sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja DPUPR Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemandapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga. Dengan kualitas jalan yang baik dan mantap diharapkan akan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko keselamatan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar. Disamping kemandapan jalan, umur pakai jalan juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan semakin berkembangnya wilayah permukiman masyarakat di Kota Denpasar maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap meningkatkan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat ke pusat- pusat kegiatan (PK). Dengan meningkatnya aksesibilitas menuju PK diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana misi pemerintah Kota Denpasar.

Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar merupakan masalah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata, perlintasan transportasi darat antar daerah dan antar pulau serta pusat ibukota Propinsi Bali. Kemacetan lalu lintas khususnya pada jalan utama di Kota Denpasar disebabkan berbagai faktor selain karena kualitas jalan dan kuantitas jalan adalah disebabkan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor, tidak disiplinnya pengguna jalan dalam berlalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan, penggunaan kendaraan bermotor (mobil) untuk

mengantar dan menjemput siswa sekolah, dan banyaknya persimpangan jalan yang menyebabkan melambatnya laju kendaraan. Mengingat rata-rata bentang jalan di wilayah Kota Denpasar yang pendek dan dengan lebar yang tidak sepadan dengan volume kendaraan, mengakibatkan kemacetan di satu ruas jalan berdampak pada ruas jalan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut diatas DPUPR Kota Denpasar melakukan upaya-upaya pemeliharaan jalan guna mengurangi pelambatan laju kendaraan dan melakukan peningkatan jalan khususnya jalan tembus jalan alternatif untuk memecah arus lalu lintas dengan maksud untuk mengurangi kemacetan pada satu titik ruas jalan yang dapat berdampak kemacetan pada ruas jalan yang lain.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyediakan fasilitas infrastruktur menyebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan lingkungan. Melalui partisipasi masyarakat akan dapat mengefektifkan upaya peningkatan jalan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan peningkatan jalan. Bentuk partisipasi masyarakat adalah merencanakan, melaksanakan dan membiayai peningkatan jalan di lingkungan permukimannya, dan Pemerintah Kota Denpasar membantu penyediaan aspal dan paving serta mesin penggilas (*wheel roller*). Partisipasi masyarakat akan dapat meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya. Diharapkan partisipasi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan dapat tercapai dan merata. Realisasi Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2022 tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Adapun realisasi Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja terhadap Renstra dan RPJMD Tahun 2022 telah tercapai sesuai target, sebagaimana terlampir pada tabel 3.3 dan 3.4.

Perencanaan dan kesungguhan serta komitmen pelaksanaan program dan kegiatan adalah faktor utama keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah rendahnya profesionalisme dan komitmen penyedia barang dan jasa pelaksana pekerjaan untuk berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Dalam rangka mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan upaya-upaya pemilihan penyedia barang dan jasa melalui seleksi atau evaluasi yang lebih mendalam. Keterbatasan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien yaitu dengan membagi habis semua kegiatan sesuai dengan Uraian Tugasnya, serta mengefektifkan koordinasi antar bidang sehingga informasi, asistensi dan kolaborasi penyelesaian permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan baik.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPUPR T.A. 2022

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Keterangan		
					Alasan / Penjelasan *)	Solusi / Strategi Pencapaian Program **)	Anggaran Perubahan
1	2	3	5	7			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			96,18			
	1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	97,00	Memenuhi Target		17.133.434.200,00
	1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
	1.2.1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	99,59	Memenuhi Target		101.268.550,00
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	96,74	Memenuhi Target		
	1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	66,67	Tidak Memenuhi Target		
	1.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	99,87	Memenuhi Target		106.513.950,00
	1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	98,16	Memenuhi Target		
	1.3.5 Penyediaan Bahan/ Material	100 %	100 %	94,75	Memenuhi Target		7.761.257.000,00
	1.3.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	100 %	56,79	Tidak Memenuhi Target		
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	1.4.1 Pengadaan Alat Besar	100 %	100 %	94,89	Memenuhi Target		1.400.000.000,00
	1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	66,67	Tidak Memenuhi Target		
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	80,23	Memenuhi Target		
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	98,37	Memenuhi Target		13.137.709.734,00
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	82,79	Memenuhi Target		
	1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	99,90	Memenuhi Target		
	1.6.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	99,90	Memenuhi Target		

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Keterangan		
						Alasan / Penjelasan *)	Solusi / Strategi Pencapaian Program **)	Anggaran Perubahan
1	2		3	5	7			
	1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	97,40	Memenuhi Target		
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				95,94			
	2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	2.1.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	100 %	95,94	Memenuhi Target		1.929.147.120,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				74,33			
	3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota							
	3.1.1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100 %	100 %	74,33	Tidak Memenuhi Target		
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				13,19			
	4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota							
	4.1.1	Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/TPS	100 %	100 %	13,19	Tidak Memenuhi Target		21.089.495.000,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				91,10			
	5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
	5.1.1	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100 %	100 %	91,10	Memenuhi Target		
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				92,34			
	6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
	6.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	100 %	100 %	79,34	Memenuhi Target		1.706.349.572,00
	6.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100 %	100 %	95,91	Memenuhi Target		6.214.237.380,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Keterangan		
					Alasan / Penjelasan *)	Solusi / Strategi Pencapaian Program **)	Anggaran Perubahan
1	2	3	5	7			
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			88,00			
	7.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota						
	7.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	88,16	Memenuhi Target		16.082.902.000,00
	7.1.2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	82,30	Memenuhi Target		433.545.086,00
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			87,49			
	8.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
	8.1.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100 %	100 %	98,72	Memenuhi Target		1.075.599.800,00
	8.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	80,64	Memenuhi Target		1.135.249.700,00
	8.1.3 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100 %	100 %	29,30	Tidak Memenuhi Target		73.989.800,00
IX	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			82,31			
	9.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota						
	9.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 %	100 %	82,31	Memenuhi Target		37.672.250.000,00
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			76,22			
	10.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota						
	10.1.1 Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	100 %	100 %	71,60	Tidak Memenuhi Target		359.241.150,00
	10.1.2 Rekonstruksi Jalan	100 %	100 %	71,17	Tidak Memenuhi Target		2.950.474.150,00

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Keterangan		
						Alasan / Penjelasan *)	Solusi / Strategi Pencapaian Program **)	Anggaran Perubahan
1	2		3	5	7			
	10.1.3	Rehabilitasi Jalan	100 %	100 %	76,44	Memenuhi Target		35.228.379.843,00
	10.1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	100 %	100 %	76,84	Memenuhi Target		3.031.840.508,00
	10.1.5	Pembangunan Jembatan	100 %	100 %	77,53	Memenuhi Target		
	10.1.6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100 %	100 %	98,11	Memenuhi Target		
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				78,61			
	11.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Darah Kabupaten/Kota							
	11.1.1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100 %	100 %	79,60	Memenuhi Target		255.397.444,00
	11.2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							
	11.2.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 %	100 %	72,78	Tidak Memenuhi Target		43.482.478,00
XII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				91,83			
	12.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota							
	12.1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	90,67	Memenuhi Target		1.324.250.000,00
	12.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota							
	12.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	96,73	Memenuhi Target		
	12.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota							
	12.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang dan Penataan Ruang	100 %	100 %	91,71	Memenuhi Target		293.800.000,00
	12.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 %	100 %	98,52			
	JUMLAH		100 %	100 %	77,20			

Keterangan :

*) dan **) dapat dilihat dalam tabel Permasalahan dan Solusi.

3.2 Realisasi Anggaran

Cara untuk mencapai target kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian yang telah ditargetkan (*output*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Penyelesaian fisik kegiatan yang ditargetkan sebagaimana DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak dapat terealisasi sesuai target. Capaian realisasi fisik (*output*) adalah sebesar **100 %**. Pembiayaan untuk capaian realisasi RKT dan PK atau realisasi keuangan adalah sebesar **77,20 %**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.4 tentang Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Relisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	TARGET		REALISASI		
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					96,18
	1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	17.133.434.200,00	100 %	16.619.366.372,00	97,00
	1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	1.2.1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 %	101.268.550,00	100 %	100.856.000,00	99,59
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	522.528.700,00	100 %	505.519.000,00	96,74
	1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	308.278.524,00	100 %	205.514.800,00	66,67
	1.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	106.513.950,00	100 %	106.378.400,00	99,87
	1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	56.700.000,00	100 %	55.656.000,00	98,16
	1.3.5 Penyediaan Bahan/ Material	100 %	7.761.257.000,00	100 %	7.353.757.496,00	94,75
	1.3.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	12.000.000,00	100 %	6.815.000,00	56,79
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	1.4.1 Pengadaan Alat Besar	100 %	1.400.000.000,00	100 %	1.328.500.000,00	94,89
	1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	30.000.000,00	100 %	20.000.000,00	66,67
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	612.000.000,00	100 %	491.014.612,00	80,23
	1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	13.137.709.734,00	100 %	12.923.173.189,00	98,37

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN		TARGET		REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	2		3	4	5	6	7
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	932.170.000,00	100 %	771.748.000,00	82,79
	1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	285.000.000,00	100 %	284.718.835,00	99,90
	1.6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	40.000.000,00	100 %	39.960.000,00	99,90
	1.6.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	236.560.000,00	100 %	230.408.800,00	97,40
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						95,94
	2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	2.1.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100 %	1.929.147.120,00	100 %	1.850.904.898,00	95,94
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						74,33
	3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota						
	3.1.1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100 %	3.896.599.500,00	100 %	2.896.191.890,00	74,33
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						13,19
	4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota						
	4.1.1	Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/TPS	100 %	21.089.495.000,00	100 %	2.781.267.668,00	13,19
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						91,10
	5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
	5.1.1	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100 %	1.174.212.250,00	100 %	1.069.693.585,00	91,10
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						92,34
	6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
	6.1.1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	100 %	1.706.349.572,00	100 %	1.353.901.730,00	79,34
	6.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100 %	6.214.237.380,00	100 %	5.960.025.680,00	95,91

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN		TARGET		REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	2		3	4	5	6	7
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						88,00
	7.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota						
	7.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	16.082.902.000,00	100 %	14.177.968.471,00	88,16
	7.1.2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	433.545.086,00	100 %	356.814.682,00	82,30
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						87,49
	8.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
	8.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	100 %	1.075.599.800,00	100 %	1.061.849.300,00	98,72
	8.1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	1.135.249.700,00	100 %	915.471.076,00	80,64
	8.1.3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100 %	73.989.800,00	100 %	21.677.500,00	29,30
IX	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						82,31
	9.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota						
	9.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 %	37.672.250.000,00	100 %	31.008.892.695,00	82,31
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						76,22
	10.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota						
	10.1.1	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	100 %	359.241.150,00	100 %	257.219.506,00	71,60
	10.1.2	Rekonstruksi Jalan	100 %	2.950.474.150,00	100 %	2.099.870.600,00	71,17
	10.1.3	Rehabilitasi Jalan	100 %	35.228.379.843,00	100 %	26.927.579.646,00	76,44
	10.1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	100 %	3.031.840.508,00	100 %	2.329.527.220,00	76,84
	10.1.5	Pembangunan Jembatan	100 %	3.687.145.600,00	100 %	2.858.777.857,00	77,53
	10.1.6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100 %	101.150.000,00	100 %	99.240.000,00	98,11
XI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						78,61
	11.1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
	11.1.1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100 %	255.397.444,00	100 %	203.291.492,00	79,60
	11.2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
	11.2.1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 %	43.482.478,00	100 %	31.645.400,00	72,78

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	TARGET		REALISASI		
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
XII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					91,83
	12.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota					
	12.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	100 %	1.324.250.000,00	100 %	1.200.679.895,00	90,67
	12.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota					
	12.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100 %	134.950.000,00	100 %	130.536.600,00	96,73
	12.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota					
	12.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang dan Penataan Ruang	100 %	293.800.000,00	100 %	269.435.000,00	91,71
	12.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100 %	135.610.000,00	100 %	133.600.000,00	98,52
	JUMLAH	100 %	182.704.719.039,00	100 %	141.039.448.895,00	77,20

Dari tabel diatas dapat dilihat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja DPUPR dalam T.A 2022. Dimana dari Rp. 182.704.719.039,00 (100 %) anggaran yang tersedia dalam DPA terealisasi sebesar Rp. 141.039.448.895,00 (77,20 %). Terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 41.665.270.144,00 (22,80 %).

3.3 Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	<p>Serapan anggaran :</p> <p>Rencana : 100 % (Rp 182.704.719.039,00)</p> <p>Realisasi : 77,20 % (Rp 141.039.448.895,00)</p> <p>Deviasi : -22,80 % (Rp 41.665.270.144,00)</p> <p>Hal ini disebabkan karena:</p> <p>Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPST-3R/TPS</p> <p>Pekerjaan : Pembangunan TPST di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur</p> <p>Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>Pagu sebesar Rp. 7.830.000.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Pekerjaan : Pembuatan DED Pembangunan TPST di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur</p>	<p>1. Sisa Pagu dikembalikan sebagai SILPA</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	<p>Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Pagu sebesar Rp.90.000.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan TPST di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur</p> <p>Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Pagu sebesar Rp.90.000.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPST-3R/TPS</p> <p>Pekerjaan : Pembangunan TPST di Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat</p> <p>Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pagu Rp. 7.830.000.000,00 direncanakan digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp 330.000.000,00 digunakan untuk: Penyusunan UKL UPL dan Persetujuan Teknis untuk Pembangunan 3 TPST yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR (Desa Padangsambian Kaja, Desa Kesiman Kertalangu dan Kelurahan Pedungan/Kawasan Tahura) - Rp 99.840.000,00 digunakan untuk: Dana jasa pendamping/ fasilitator non ASN untuk kegiatan TPS3R. - Rp 7.400.160.000,00 dikembalikan sebagai SILPA <p>Realisasi penganggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp 330.000.000,00 digunakan untuk: Penyusunan UKL UPL dan Persetujuan Teknis untuk Pembangunan 3 TPST yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR (Desa Padangsambian Kaja, Desa Kesiman Kertalangu dan Kelurahan Pedungan/Kawasan Tahura) - Rp 33.280.000,00 digunakan untuk: Dana jasa pendamping/ fasilitator non ASN untuk kegiatan TPS3R. - Rp 7.466.720.000,00 dikembalikan sebagai SILPA <p>Pekerjaan : Pembuatan DED Pembangunan TPST di Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat</p> <p>Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pagu sebesar Rp.80.000.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p>	<p>2. Sisa Pagu dikembalikan sebagai SILPA</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
3	<p>Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan TPST di Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat</p> <p>Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pagu sebesar Rp.80.000.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</p> <p>Pekerjaan : Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan Tidak dilaksanakan karena lahan yang akan digunakan masih bermasalah.</p> <p>Pagu sebesar Rp.666.666.666,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Pekerjaan : Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Panjer, Kec. Denpasar Selatan tidak dilaksanakan karena lahan yang akan digunakan masih bermasalah.</p> <p>Pagu sebesar Rp.666.666.666,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Pekerjaan : Pembangunan TPS 3R di Kelurahan Renon, Kec. Denpasar Selatan (DAK Sanitasi 2022)</p> <p>Tidak dilaksanakan karena lahan yang akan digunakan masih bermasalah.</p> <p>Pagu sebesar Rp.633.157.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p> <p>Pekerjaan : Pembangunan TPS 3R baru di Desa Pemecutan Kaja, (DAK Sanitasi 2022)</p> <p>Tidak dilaksanakan karena lahan yang akan digunakan masih bermasalah.</p> <p>Pagu sebesar Rp.633.157.000,00 dikembalikan sebagai SILPA</p>	<p>3. Sisa Pagu dikembalikan sebagai SILPA</p>
4	<p>Program : Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin dan Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan</p> <p>Sub Kegiatan : Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Penataan Taman Pantai Bangsal Desa Sanur Kaja</p>	<p>4. Sisa Pagu dikembalikan sebagai SILPA</p>

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
5	Pekerjaan : Penataan ini tidak dilaksanakan karena berdasarkan Berita Acara Rapat Pemaksan Pura Segara Desa Adat Sanur yang dilaksanakan, penataan tersebut akan dilakukan dan dikelola secara mandiri atas lahan milik Pura Segara Desa Adat Sanur. Pagu: Rp 178.000.000,00 Prosentase penawaran pekerjaan rata-rata sebesar 78,28 % dari pagu anggaran	5. Efisiensi anggaran dikembalikan sebagai SILPA

3.4 Keterkaitan Antara Program Nasional, Provinsi dan Kota

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan tupoksi dari Dinas PUPR, selalu mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan Nasional mau pun Provinsi agar selalu berkesinambungan.

Untuk program nasional yang berkaitan dengan program Dinas PUPR pada T.A 2022, yaitu program yang tercantum dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) ke PUPR an dan program yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Program yang menunjang SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dilaksanakan Dinas DPUPR dalam T.A 2022 adalah:

Tabel 3.5
Program Nasional yang Menunjang SPM

Program	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.896.191.890,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.069.693.585,00
TOTAL	3.965.885.475,00

Sedangkan program yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dilaksanakan Dinas DPUPR dalam TA 2022 adalah:

Tabel 3.6
Program DPUPR yang Mendapatkan DAK

Program	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.896.191.890,00
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.781.267.668,00
Program Penyelenggaraan Jalan	26.927.579.646,00
TOTAL	32.605.039.204,00

BAB IV

INOVASI DPUPR YANG MASUK DALAM IGA (INOVATION GOVERNMENT AWARD)

4.1 TAKSU BLI RAI (Tata Kualitas Sungai Untuk Bersih, Lestari, Ramah dan Indah)

Kondisi lingkungan sungai yang kotor, tidak tertata dan menjadi sumber aroma yang tidak sedap sebagai akibat masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah padat / sampah dan cair ke sungai adalah kondisi Tukad Badung yang sangat tidak diharapkan dalam upaya menjadikan Kota Denpasar khususnya kawasan heritage yang sehat, indah dan lestari. Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan sungai dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan menyediakan layanan pengangkutan sampah serta menyediakan tempat pembuangan sampah sementara, namun upaya ini dirasa masih belum dapat merubah perilaku sebagian masyarakat untuk tidak membuang limbah/sampah ke sungai . Berangkat dari kondisi tersebut Bpk.Walikota Denpasar mengarahkan untuk melakukan revitalisasi / penataan Tukad Badung sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar dan berperan aktif menjaga kebersihan sungai sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka bagi masyarakat, mempercantik wajah kota, menyediakan obyek wisata baru serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar, maka dirancang untuk menata Tukad Badung secara fisik dengan konstruksi yang berfungsi untuk penguatan tanggul dan bantaran sungai dan secara arsitektural untuk mempercantik wajah sungai dengan bernuansakan arsitektur tradisional Bali dengan konsep Taman yang memanfaatkan land scape sebanyak mungkin untuk dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang ramah bagi semua kalangan. Secara philosophy dan spiritual penataan Tukad Badung adalah berlandaskan konsep Tri Hita Karana yaitu terciptanya kondisi keharmonisan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam / lingkungan dan manusia dengan Tuhan. Dengan tertatanya Tukad Badung diharapkan masyarakat teredukasi dan menumbuhkan rasa malu untuk mengotori sungai dan terbangunnya mind set hidup bersih, dan sekaligus menikmati betapa indah dan nyamannya hidup bersih dilingkungan yang bebas sampah.

4.2 SIJALAK (Sistem Informasi jalan Kota Denpasar)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital di Pemerintahan pada era saat ini dan yang akan datang adalah merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dihindarkan. Pelayanan Publik yang cepat, tepat terukur dan berkepastian serta kebutuhan kecepatan, keakurasian, ketersediaan berbagai jenis data dan informasi oleh masyarakat dari berbagai lapisan yang harus disediakan oleh Pemerintah adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dengan tersedianya pelayanan publik dan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang berbasis teknologi digital diharapkan akan mampu mendorong percepatan penguasaan teknologi digital serta memperkecil gap pengetahuan dan penerapan teknologi digital baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Dalam upaya menyediakan kemudahan akses informasi data dan pelayanan publik secara digital serta memenuhi harapan-harapan sebagaimana diuraikan di atas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar membangun portal sistem teknologi informasi berbasis website Dama Mandala yang di dalam terdapat aplikasi SIJALAK.

SIJALAK (Sistem Informasi Jalan Kota) Denpasar adalah aplikasi berbasis web dan android yang berisi tentang informasi jaringan jalan di wilayah administrasi Kota Denpasar. SIJALAK merupakan sistem informasi yang berdasarkan pada data keruangan (spasial) dan mempresentasikan jaringan jalan di permukaan bumi. Teknologi informasi yang ada berupa perangkat yang membantu dalam menyimpan, menganalisa, dan mengelola data serta menyajikan informasi. Melalui SIJALAK diharapkan bahwa ada integrasi data infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Denpasar khususnya di bidang jalan sehingga bisa menjadi sumber data yang valid bagi pengambil kebijakan serta bagi masyarakat umum.

4.3 SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi Kota Denpasar)

SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi) Denpasar adalah aplikasi berbasis web dan android yang berisi tentang informasi jaringan drainase dan irigasi di wilayah administrasi Kota Denpasar. SIDASI merupakan sistem informasi yang berdasar pada data keruangan (spasial) dan mempresentasikan jaringan drainase dan irigasi di permukaan bumi. Teknologi informasi yang ada berupa perangkat yang membantu dalam menyimpan, menganalisa, dan mengelola data serta menyajikan informasi. Melalui SIDASI diharapkan bahwa ada integrasi data infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Denpasar khususnya di bidang drainase dan irigasi sehingga bisa menjadi sumber data yang valid bagi pengambil kebijakan serta bagi masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh Sasaran Strategis dan pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sebagaimana dimaksud mencerminkan telah diterapkannya aspek efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian diperlukan perencanaan yang lebih matang dan *reasonable* sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih efisien dan efektif, diperlukan peningkatan disiplin, kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Permasalahan-permasalahan teknis terkait dengan koordinasi dengan instansi terkait serta langkah-langkah koordinasi, edukasi dan persuasi kepada masyarakat/stakeholder perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya memperlancar pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan. Evaluasi yang lebih mendalam sangat diperlukan terhadap pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang khususnya untuk penawaran dibawah 80%, sehingga dapat dihindari terjadinya kegagalan penyelesaian pekerjaan. Diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas adalah :

1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memformulasikan pemecahan masalah dan melakukan kajian peraturan dan perundangan dalam upaya menindaklanjuti permasalahan.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas SDM aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas koordinasi, mediasi dan persuasi kepada masyarakat / stakeholder serta instansi terkait.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

6. Meningkatkan efektifitas dan responsifitas pemilihan penyedia barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Denpasar.

Dengan capaian kinerja PK dan RKT DPUPR Kota Denpasar diharapkan akan dapat mendorong peningkatan layanan publik, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar serta dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dan *stake holder* untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1 Program : Penyelenggaraan Jalan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

Pekerjaan Pengaspalan Ruas Jalan Maruti



2. Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Segina Kertapura



- 3 Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Pekerjaan Pemasangan Pipa Induk Sekunder Air Minum



Pekerjaan Pemasangan Aksesoris Pipa Air Minum



- 4 Program : Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pekerjaan Penataan Kawasan Heritage Gajah Mada (Tahap II)

